

**Keputusan Wali Kota Salatiga
Nomor 000.7.2 / 303 / 2025
tentang**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

Lampiran XXIX



KECAMATAN SIDOREJO

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II.....	9
EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025.....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo sampai dengan Triwulan I dan Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sidorejo.....	9
2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sidorejo.....	10
2.3. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025.....	11
BAB III.....	12
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	12
KECAMATAN SIDOREJO	12
BAB V	15
PENUTUP	15

DAFTAR BAGAN

BAGAN 1 STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SIDOREJO 5

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 1 INDIKATOR KINERJA UTAMA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I.....	10
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 diatur bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- c. Pergeseran pagu kegiatan antar kegiatan perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja merupakan perencanaan tahunan yang merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lain agar mampu menjawab tantangan perkembangan lingkungan (strategis) regional serta nasional dan tetap berada dalam sistem manajemen nasional. Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo Tahun 2025 merupakan kebutuhan nyata untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang akan berkaitan pula dengan penerapan sistem pertanggungjawaban pemerintah yang tepat, jelas dan nyata.

Adapun fungsi dari Perubahan Rencana Kerja tersebut adalah :

1. Sebagai jaminan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Sidorejo.
2. Merupakan indikator dalam pencapaian pemberdayaan masyarakat sebagai adalah satu unsur potensi sumber daya masyarakat secara efektif, efisien.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2025 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Saerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2024;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2024-2045;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kedrja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota salatiga Tahun 2023-2026;
15. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025;
16. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo Tahun 2025 dimaksudkan untuk:

1. Memberi kerangka arah pembangunan dalam mewujudkan program serta sebagai indikator dan tolok ukur kemampuan kinerja Kecamatan Sidorejo.
2. Sebagai jaminan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Sidorejo.

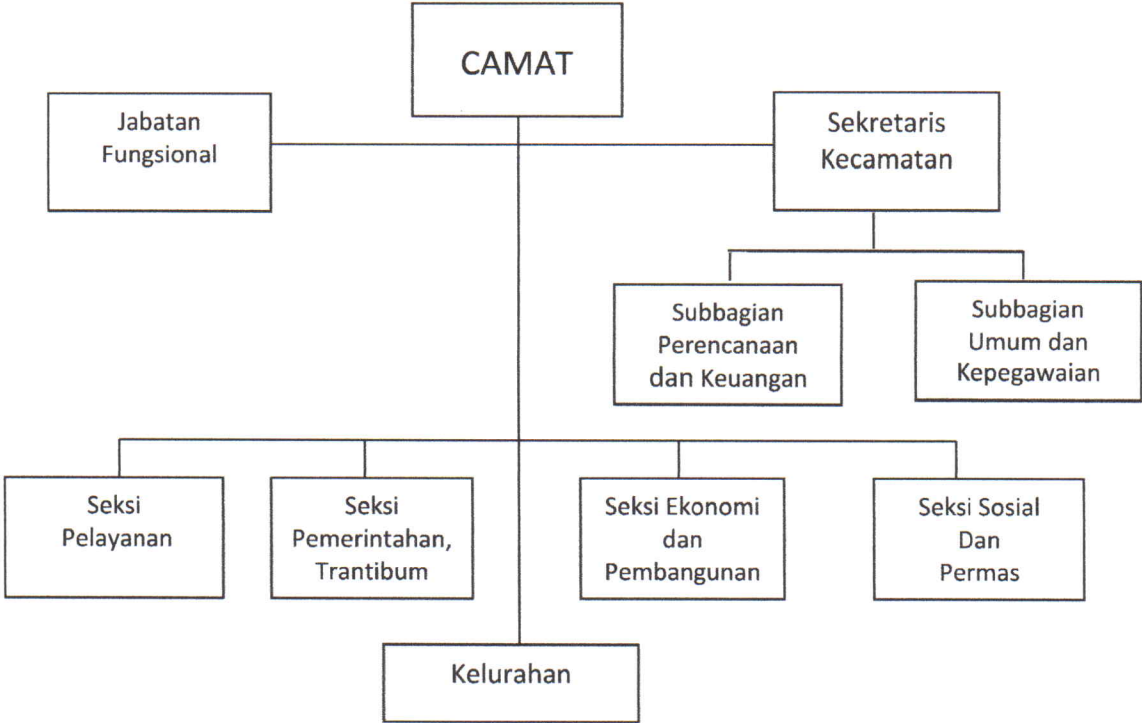
3. Indikator dalam pencapaian pemberdayaan masyarakat sebagai adalah satu unsur potensi sumber daya masyarakat secara efektif, efisien

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya jaminan sinergitas, sinkronisasi dan integritas bagi perencanaan pembangunan sebagai wujud penyaluran aspirasi bagi seluruh elemen masyarakat dan usulan dari lembaga yang ada di Kelurahan se Kecamatan Sidorejo.
2. Terwujudnya kualitas pengelenggaraan kegiatan pembangunan yang kredibilitas dalam rangka mencapai Tata Pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance*.
3. Tersusunnya dasar acuan perencanaan strategis bagi Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga sehingga perencana pembangunan akan lebih terarah sesuai dengan aspirasi dari masyarakat dan usulan lembaga-lembaga di Kelurahan.

Untuk mendukung tercapainya pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo perlu adanya dukungan tugas dan fungsi Organisasi yang sesuai dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan sebagai berikut :

Bagan 1 : Struktur Organisasi Kecamatan Sidorejo



Berdasarkan bagan di atas dapat diketahui bahwa susunan organisasi Kecamatan Sidorejo terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 118 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
2. pelaksanaan koordinasi pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan;
3. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
4. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota di Tingkat Kecamatan;
5. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di tingkat kecamatan;
6. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
7. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah kota yang ada di Kecamatan;
9. pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan

10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Camat dibantu oleh Sekretariat Kecamatan, dan seksi-seksi yang berada di kecamatan. Berikut adalah Tugas dan fungsi masing- masing :

1. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan, serta pelayanan administratif Kecamatan dilingkup perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian perencanaan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan melalui usulan Seksi Kecamatan dan Kelurahan sesuai lingkup tugas Sekretariat;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
- d. pelayanan administratif Kecamatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sekretaris Kecamatan dalam menyelenggarakan fungsinya mempunyai uraian tugas :

- a. mengoordinasikan perencanaan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kebijakan;
- c. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam

rangka meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan;

- d. menyelenggarakan pelayanan administrative Kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sekretaris Kecamatan membawahi Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian

1) Subbagian Perencanaan dan keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan, serta pelayanan administratif Kecamatan dilingkup perencanaan dan keuangan;

2). Subbagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif Kecamatan di lingkup umum dan kepegawaian.

2. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dilingkup pelayanan perizinan dan non perizinan.

3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan di lingkup pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum.

4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dilingkup ekonomi dan pembangunan.

5. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan dilingkup sosial dan pemberdayaan masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
- Bab I Pendahuluan memuat uraian mengenai latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo Tahun 2025.
- Bab II Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025
- Bab II memuat uraian Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sidorejo sampai dengan Triwulan II dan Analisis Kinerja Kecamatan Sidorejo, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sidorejo, Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sidorejo
- Bab III berisikan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Sidorejo Tahun 2025 yang ditampilkan pada tabel yang berisikan Kode, Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
- Bab IV Penutup
- Bab IV memuat diantaranya Kesimpulan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo sampai dengan Triwulan II dan Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sidorejo

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu sebagaimana telah disusun dalam perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Sidorejo selama satu tahun anggaran yang mengacu pada sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Sidorejo, maka dapat disampaikan bahwa dengan pelaksanaan koordinasi yang baik dengan semua pihak dapat mewujudkan program kegiatan yang sesuai dengan renja setiap tahunnya.

Sampai dengan akhir Triwulan II tahun berjalan, hampir semua program dan kegiatan sudah dilaksanakan. Adapun realisasi capaian keuangan sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp.9.781.224.328,00 (sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) atau 57,25% dari anggaran sebesar Rp17.085.991.950,00 (tujuh belas miliar delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Kegiatan sampai dengan Triwulan II dapat terlaksana antara lain karena dukungan, kerja sama dan kepatuhan pengampu kegiatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Secara terperinci evaluasi hasil renja dapat dilihat pada lampiran renja tabel 1 (**tabel E.81**), sedangkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Renja PD disajikan dalam tabel 2 (**tabel e.70**).

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	88,00	89,17	101,33
2	Persentase Realisasi Wajib Pajak Yang Membayar PBB P2	%	93,54	71,92	76,88
3	Persentase Realisasi Usulan Hasil Musrenbang	%	59,00	30,23	51,24
4	Persentase PKK Aktif	%	60,00	100	166,66

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sidorejo

Secara umum program dan kegiatan di Kecamatan Sidorejo sudah berjalan sesuai perencanaan. Pelayanan kepada masyarakat dan *stakeholder* berjalan dengan lancar.

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih di luar IKU antara lain :

1. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa kegiatan yang terpaksa tidak dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan Perwali Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Perwali No.50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang tentunya sudah dikoordinasikan dengan *stakeholder* dan masyarakat di wilayah yang terdampak.
2. Pembentukan Koperasi Merah Putih di kelurahan se Kecamatan Sidorejo. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025

tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/2438/SJ tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kepala Desa/Lurah agar memfasilitasi pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih melalui pendirian koperasi baru, pengembangan koperasi yang sudah ada, atau revitalisasi koperasi.

2.3. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 maka pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan khususnya pada sub kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (dana kelurahan), sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD mengalami efisiensi.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SIDOREJO

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo Tahun 2025 mengacu pada Renstra Kecamatan Sidorejo Tahun 2023-2026. Perubahan Renja merupakan penjabaran dari Renstra serta memperhatikan dan mengacu pada perubahan RKPD Kota Salatiga tahun 2025.

Sementara itu, ukuran tentang keberhasilan pencapaian arah kebijakan pembangunan pemerintah Kota Salatiga dapat diukur secara kuantitatif dari Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari setiap aspek dan lokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang ada di Kota Salatiga. Lebih lanjut, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota Salatiga.

Target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sidorejo Tahun 2025 beserta perubahannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Indikator	Satuan	Target RKPD Penetapan	Target RKPD Perubahan	Realisasi s/d TW II	Capaian
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	88,00	88,70	89,17	100,53
2	Persentase Realisasi Wajib Pajak Yang Membayar PBB P2	%	93,54	93,54	71,92	76,89
3	Persentase Realisasi Usulan Hasil Musrenbang	%	59,00	65,00	30,23	46,51
4	Persentase PKK Aktif	%	60,00	100	100	100

Terdapat perubahan target pada Indikator Kinerja Utama di Kecamatan Sidorejo dikarenakan penyesuaian dengan realisasi yang sudah dicapai pada periode sebelumnya.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan Renja Kecamatan Sidorejo tahun 2025 dijabarkan dalam 5 program, 14 kegiatan dan 41 sub kegiatan. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Sidorejo Tahun 2025 ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SIDOREJO TAHUN 2025						
Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1				2	3	
7				Urusan Unsur Kewilayahan		
7	01			Bidang Urusan Kecamatan	17.776.229.018	
7	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.446.360.018	
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	
7	01	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.669.614.110	
7	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.564.614.110	
7	01	01	2.02	02 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	105.000.000	
7	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	7.950.000	
7	01	01	2.03	02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7.950.000	
7	01	01	2.05	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	4.945.000	
7	01	01	2.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	4.945.000	
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	275.256.000	
7	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.000.000	
7	01	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	
7	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.000.000	
7	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.950.000	
7	01	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	15.120.000	
7	01	01	2.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	3.000.000	
7	01	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.186.000	
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	720.408.500	
7	01	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	596.652.300	
7	01	01	2.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	123.756.200	
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	541.251.488	
7	01	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	
7	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik	72.000.000	
7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	466.251.488	

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SIDOREJO TAHUN 2025						
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.934.920
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	35.000.000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	70.000.000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	56.935.210
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.999.710
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	86.590.200
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	65.000.000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	65.000.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit KerjanPerangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	21.590.200
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.590.200
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5.904.433.800
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.904.433.800
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	262.880.000
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.641.553.800
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	74.500.000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	318.161.000
					Kelurahan Sidorejo Lor	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	720.199.800
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	564.644.600
					Kelurahan Salatiga	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	630.278.400
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	480.747.200
					Kelurahan Bugel	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	317.000.000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	173.948.700
					Kelurahan Pulutan	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	314.357.500
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	180.375.600
					Kelurahan Kauman Kidul	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	359.163.400
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	155.123.200
					Kelurahan Blotongan	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	846.605.300
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	506.449.100
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	112.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	112.000.000
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	112.000.000,00
7	01	06			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	226.845.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	226.845.000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	226.845.000,00

BAB IV

PENUTUP

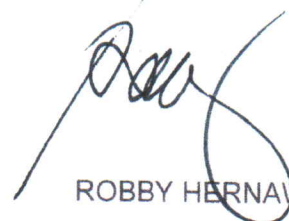
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Tahun 2023-2026, agar pelaksanaanya lebih terarah dan terprogram dari satu tahapan ketahapan berikutnya.

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga yaitu untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan, maka semua pihak hendaknya ikut mendukung program-program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Sidorejo.

Hal mendasar yang akan menjadi pendukung dan menumbuhkan benang merah kerjasama adalah kepedulian dan koordinasi antar instansi atau OPD terkait, tanpa pemahaman untuk kerjasama antar OPD terkait akan sulit rasanya semua rancangan kegiatan yang terprogram ini dapat terlaksana.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo ini disusun dengan satu harapan agar Kecamatan Sidorejo mampu mendukung arah kebijakan kota Salatiga untuk “Mewujudkan Insan yang Sehat dan Cerdas Menuju Salatiga yang Bersih, Sehat dan Berilmu serta Berbudiluhur” yang mengacu pada misi RPJPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

WALI KOTA SALATIGA



ROBBY HERNAWAN

LAMPIRAN

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada saasaran RKPD

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
 2. Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PPh P2
 3. Persentase realisasi usulan hasil Musrenbang Kecamatan Sidorejo
 4. Persentase PKK aktif

88
 93,5-4
 59
 60

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN(OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENUA PD TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENUA PD TAHUN BERJALAN TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENUA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD s.d TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD s.d TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 s.d 12		14 s.d 100%		15	
1	Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur di Kecamatan	PROGRAM PENUJIANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	400	41.483.415.000	200	19.132.249.885	100	8.916.842.406	25	2.330.361.521	25	3.171.432.258	0	0	0	0	50	5.501.793.779	250	24.634.043.664	62,50	59,38		
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	400	26.000.000	200	16.628.550	100	10.000.000	25	749.776	25	653.328	0	0	0	0	50	1.403.104	250	18.031.654	62,50	69,35	Kecamatan Sidorejo	
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan lktiktar realisasi kinerja skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan lktiktar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lktiktar Realisasi Kinerja SKPD	39	26.000.000	18	16.628.550	10	10.000.000	6	749.776	2	653.328	0	0	0	0	8	1.403.104	26	18.031.654	66,67	69,35		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	400	36.658.165.000	200	16.519.371.303	100	8.003.417.406	25	2.308.584.215	25	2.361.885.122	0	0	0	0	50	4.670.469.337	250	21.189.840.640	62,50	57,80	Kec Sidorejo	
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280	36.240.165.000	130	16.344.891.303	70	7.916.417.406	63	2.308.584.215	63	2.340.195.122	0	0	0	0	63	4.648.779.337	193	20.993.670.640	68,93	57,93		
		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelidikan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	418.000.000	2	174.480.000	1	87.000.000	0	-	1	21.690.000	0	0	0	0	1	0	3	174.480.000	75,00	41,74		
		Kegiatan Administrasi Barasa Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya pengamanan barang milik daerah SKPD	400	23.000.000	200	72.190.975	100	80.000.000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	200	72.190.975	50,00	313,87	Kec Sidorejo	
		Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	23.000.000	4	72.190.975	1	80.000.000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	4	72.190.975	100,00	313,87		
		Kegiatan Administrasi Kewasowanan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	400	72.750.000	0	0	100	3.500.000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0,00	0,00		
		Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	280	60.000.000	0	0	70	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00	0,00		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	280	12.750.000	0	0	70	3.500.000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0,00	0,00		

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERIA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN(OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERIA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2024	TARGET KINERIA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN TAHUN 2025		REALISASI KINERIA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERIA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERIA DAN ANGGARAN RENSTRA PD s.d TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN KINERIA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD s.d TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
							I	II	III	IV													
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	400	1.029.000.000	200	580.251.986	100	3.111.200.000	25	81.494.600	25	89.931.160	0	0	0	50	171.425.760	250	751.677.746	62,50	73,05	Kec Sidorejo
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28	45.500.000	14	25.275.500	7	13.000.000	7	12.888.400	0	-	0	0	0	7	12.888.400	21	38.163.900	75,00	83,88	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28	45.500.000	14	31.828.500	7	15.000.000	7	14.849.000	0	-	0	0	0	7	14.849.000	21	46.675.500	75,00	102,58	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	28	426.000.000	14	198.552.500	7	107.000.000	7	40.262.200	7	53.717.200	0	0	0	7	93.979.400	21	292.531.900	75,00	68,67	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28	105.500.000	14	46.274.300	7	28.000.000	7	2.070.000	7	15.107.900	0	0	0	7	17.177.900	21	63.452.200	75,00	60,14	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	8	69.500.000	4	29.756.800	2	15.120.000	2	2.480.000	2	3.570.000	0	0	0	2	6.050.000	6	35.806.800	75,00	51,52	
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	8	10.500.000	4	9.216.000	2	3.000.000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	4	9.216.000	50,00	87,77	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	326.500.000	71	239.350.386	30	130.000.000	5	8.945.000	17	17.536.060	0	0	0	22	26.481.060	93	265.831.446	77,50	81,42	
		Pengadaan Barang Milik Daerah, Penulisan Utusan Pemerintah Daerah	Prosentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan	400	518.000.000	0	-	100	768.267.360	25	20.000.000	25	556241294	0	0	0	50	576241294	50	576.241.294	12,50	111,24	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	-	0	617.925.000	0	-	0	548.341.294	0	0	0	0	548341294	-	548.341.294	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28	518.000.000	0	-	7	150.342.360	7	20.000.000	7	7.900.000	0	0	0	7	27900000	7	27.900.000	25,00	5,39	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Utusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	400	1.982.000.000	200	1.074.152.519	100	520.000.000	25	143.592.712	25	138.672.564	0	0	0	50	282.265.276	250	1.356.417.795	62,50	68,44	Kec Sidorejo
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	12.000.000	2	4.460.000	1	3.000.000	0	-	0	-	0	0	0	-	-	2	4.460.000	50,00	37,17	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	280.000.000	24	90.607.579	12	72.000.000	3	12.082.530	3	11.028.198	0	0	0	6	23.110.728	30	113.718.307	62,50	40,61	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN(OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2024	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIMULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI	REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD s.d TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD s.d TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
				48	1.690.000.000		24	979.084.940	12	445.000.000	3	131.510.182		3	127.644.366	0	0		0	6	259.154.548	30	1.238.239.488
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan																				
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	400	1.174.500.000	200	847.154.952	100	300.000.000	25	17.452.700	25	24.048.790	0	0	0	50	41.501.490	250	888.656.042	62,50	75,66	Kec.Sidoarjo
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	140.000.000	3	66.521.500	1	35.000.000	1	3.175.000	1	5.730.000	0	0	0	1	8.905.000	4	75.426.500	100,00	53,88	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	180	198.000.000	89	98.625.702	45	70.000.000	13	9.307.700	10	11.098.790	0	0	0	23	20.406.490	112	119.032.192	62,22	60,12	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	28	538.000.000	14	606.323.000	7	150.000.000	0	-	-	0	0	0	0	0	-	14	606.323.000	50,00	112,70	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	130	220.500.000	70	60.244.350	30	30.000.000	7	4.970.000	7	7.220.000	0	0	0	14	12.190.000	84	72.434.350	64,62	32,85	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	28	78.000.000	14	15.440.000	7	15.000.000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	14	15.440.000	50,00	19,79	
2	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Skor KM	3,86	342.156.000	0,39	733.812.300	1	102.000.000	0	180.000	0,56	29.071.932	0	0	0	0,56	29.251.932	1	763.064.232	24,61	223,02	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase terlaksananya kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	400	281.730.000	200,00	701.185.500	100	65.000.000	25	-	25	23.184.000	0	0	0	50	23.184.000	250	724.369.500	62,50	257,11	Kec.Sidoarjo
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28	281.730.000	14	701.185.500	7	65.000.000	0	-	7	23.184.000	0	0	0	7	23.184.000	21	724.369.500	75,00	257,11	

NO	SASAPAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN(OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD s.d TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD s.d TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				400	60.426.000	200,00	32.626.800	100	37.000.000	25	180.000	5.887.932	0	0	0	50	6.067.932	250	38.694.732	62,50	64,04	
		<u>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan</u>	Presentase partisipasi masyarakat dalam efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan																			
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	60.426.000	4	32.626.800	2	37.000.000	1	180.000	5.887.932	0	0	0	1	6.067.932	5	38.694.732	62,50	64,04	
3	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	190	33.393.095.000	127,94	10.339.072.850	60	6.522.094.400	100	1.928.677.400	1.648.367.300	0	0	0	100	3.577.044.700	228	13.916.117.550	119,97	41,67	Kec Sidorejo
		<u>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</u>	Presentase partisipasi masyarakat dalam Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Presentase peningkatan partisipasi masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	230	730.000.000	156,52	1.566.480.600	60	243.640.000	100,00	43.170.300	49.786.800	0	0	0	100	92.957.100	257	1.658.437.700	111,53	227,18	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28	730.000.000	14	1.566.480.600	7	243.640.000	7	43.170.300	49.786.800	0	0	0	7	92.957.100	21	1.658.437.700	75,00	227,18	
		<u>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</u>	Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	190	32.663.095.000	110,58	8.773.592.250	50	6.278.454.400	100	1.885.507.100	1.598.580.500	0	0	0	100	3.484.087.600	211	12.257.679.850	110,83	37,53	Kec Sidorejo
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	28	378.840.000	14	153.211.000	7	84.040.000	7	74.499.000	0	0	0	0	7	74.499.000	21	227.710.000	75,00	60,11	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28	22.589.000.000	14	8.620.381.250	7	3.489.551.000	7	412.964.300	1.598.580.500				7	2.011.544.800	21	10.631.926.050	75,00		

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN(OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PD PADA TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD SAMPAI DENGAN RENJA PD TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN TAHUN 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJADAN ANGGARAN RENSTRA PD s.d TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PD s.d TAHUN 2025	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				I	II	III	IV	I	II	III	IV								
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16	9.695.255.000	8	3.478.270.167	4	2.704.863.100	4	1.398.043.800	299.453.400		4	1.697.497.200	12	5.175.767.367	75,00	
4	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase upaya peningkatan ketertarikan dan keterlibatan di tingkat wilayah	400	48.313.000	175	623.130.200	100	112.000.000	25	3.170.000	4.269.400	0	0	7.439.400	225	630.569.600	56,25	1305,18
			Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	400		175		100		25,00			0	0	0	50	-	0,00	
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Terlaksananya kegiatan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	400	48.313.000	200	623.130.200	100	112.000.000	25,00	3.170.000	4.269.400	0	0	7.439.400	50	630.569.600	12,50	1305,18
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	48.313.000	2	623.130.200	1	112.000.000	25	3.170.000	4.269.400	0	0	7.439.400	1	630.569.600	25,00	1305,18
5	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP	275,7	438.861.000	127,81	260.821.900	69	226.845.000	0,00	7.380.000	117.348.635	0	0	124.728.635	40	385.550.535	14,51	87,85
		Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	374,14	438.861.000	174,74	260.821.900	93,54	226.845.000	16,00	7.380.000	117.348.635	0	0	124.728.635	50	385.550.535	13,36	87,85
		Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8	438.861.000	4	260.821.900	2	226.845.000	1	7.380.000	117.348.635	0	0	124.728.635	1	385.550.535	12,50	87,85
																			Kec Sidorejo
																			Kec Sidorejo

NO	KODE	URUTAN / BIDANG URUTAN / BIDANG KEKAYATAN / SUB KEKAYATAN	INDIKATOR PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / SUB KEKAYATAN	TARUJAT AKHIR PENCAPAIAN RINIKTIA OPD	PELAKSI REJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN CAPAIAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PEMDAMIAN										KELOMPOK SABANAN	PACIBANAL KINERJA TAHUN 2023		PERANGKAT DARI PACIBANAL JAWAB
							PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							REKPD 2023	APRD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023		NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	7.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KEKAYATAN / SUB KEKAYATAN	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Membangun				50 %		7.040.180.000,00	6.522.394.400,00	5.904.433.800,00	-4.626.440.000,00							977.600.000,00	
	7.01.03.2.02	Sarana Pembiayaan Kelurahan	Pembiayaan partisipasi masyarakat dalam Membangun				55 %		7.160.400.000,00	6.276.454.400,00	5.641.553.800,00	-1.518.846.200,00				09 Optimalisasi pengembangan kelembagaan kelembagaan kelembagaan			707.500.000,00	KECAMATAN SCOREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit		488.856.800,00	358.183.400,00	338.183.400,00	-130.443.200,00	Kota Sumpang Kuaranta Ngali	DANA ALQASH UMUM (DALU)	-	09 Optimalisasi pengembangan kelembagaan kelembagaan kelembagaan			488.856.800,00	KECAMATAN SCOREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pembentukan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Omase yang dilekaskan di Kelurahan				4 Pokmas / Omase		201.393.400,00	237.550.800,00	155.123.200,00	-46.870.200,00	Kota Sumpang Kuaranta Ngali	DANA ALQASH UMUM (DALU)	-	09 Optimalisasi pengembangan kelembagaan kelembagaan kelembagaan			201.393.400,00	KECAMATAN SCOREJO
7		KEKAYATAN							18.812.225.848,00	16.899.244.100,00	17.776.239.910,00	-1.835.796.000,00							11.698.860.000,00	
7.01		KEKAYATAN							18.812.225.848,00	16.899.244.100,00	17.776.239.910,00	-1.835.796.000,00							11.698.860.000,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KEKAYATAN / SUB KEKAYATAN	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Membangun				50 %		7.040.180.000,00	6.522.394.400,00	5.904.433.800,00	-4.626.440.000,00							977.600.000,00	
	7.01.03.2.02	Sarana Pembiayaan Kelurahan	Pembiayaan partisipasi masyarakat dalam Membangun				55 %		7.160.400.000,00	6.276.454.400,00	5.641.553.800,00	-1.518.846.200,00				09 Optimalisasi pengembangan kelembagaan kelembagaan kelembagaan			707.500.000,00	KECAMATAN SCOREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit		977.868.700,00	910.185.300,00	846.605.300,00	-131.263.400,00	Kota Sumpang Kuaranta Ngali	DANA ALQASH UMUM (DALU)	-	09 Optimalisasi pengembangan kelembagaan kelembagaan kelembagaan			0,00	KECAMATAN SCOREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pembentukan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Omase yang dilekaskan di Kelurahan				4 Pokmas / Omase		775.031.300,00	843.594.700,00	596.449.100,00	-283.342.200,00	Kota Sumpang Kuaranta Ngali	DANA ALQASH UMUM (DALU)	-	09 Optimalisasi pengembangan kelembagaan kelembagaan kelembagaan			0,00	KECAMATAN SCOREJO
									18.812.225.848,00	16.899.244.100,00	17.776.239.910,00	-1.835.796.000,00							11.698.860.000,00	
J U M L A H																				

Formulir E.70

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
Kota Salatiga**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	✓			
2	Pengolahan data dan informasi	✓			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota	✓			
7	Perumusan tujuan dan sasaran	✓			
8	Penelaahan usulan masyarakat	✓			
9	Perumusan kegiatan prioritas	✓			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan	✓			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	✓			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota	✓			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	✓			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	✓			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan	✓			

Keterangan :

Kolom (1) diisi dengan nomor urut Kegiatan;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (✓) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (✓) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.